

SINOPSIS

Kebijakan kuota perempuan pada dasarnya bersumber pada peraturan hukum Negara Indonesia yang memberikan kebebasan untuk berbicara dan menentukan pilihan yang demokratis dan menjalankan kehidupan bagi setiap warganya baik laki-laki maupun perempuan. Kebijakan tersebut juga tercantum pada UU No 2 Tahun 2008 tentang kelembagaan partai politik, dimana dalam pendirian partai politik harus menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen baik di tingkat Pusat, Kabupaten/ Kota. Di Kota Yogyakarta, PDIP masih memiliki perolehan suara mayoritas sehingga kontribusi perempuan dalam mendongkrak suara partai ini seharusnya juga signifikan. Hal lain juga didukung karena Partai ini memiliki Ketua Umum seorang perempuan yakni Ibu Megawati Soekarnoputri. Akan tetapi, dalam implikasinya ternyata partai ini belum mampu melakukan pengkruerutan kader perempuan. Hal ini terlihat dari jumlah perempuan di DPC PDIP hanya terdapat dua orang perempuan dari jumlah kepengurusan sebanyak lima belas orang. Maka dari itu, pokok permasalahan penelitian ini mengenai faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap keterwakilan perempuan di DPC PDIP Kota Yogyakarta periode tahun 2010-2015.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan yang diwawancarai adalah anggota kepengurusan DPC PDIP Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan informan dan teknik dokumentasi. Selanjutnya, pengumpulan data-data mengenai penelitian ini diperoleh dari Sekretariat DPC PDIP Kota Yogyakarta.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwasannya keterlibatan perempuan di DPC PDIP Kota Yogyakarta masih rendah. Ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya PDIP merupakan salah satu partai politik yang masih didominasi oleh kaum laki-laki. Hal tersebut terlihat jelas pada proses rekrutmen partai politik, mekanisme kaderisasi hingga upaya partai politik dalam meningkatkan peranan kaum perempuan didalam struktural partai masih minim. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan keterwakilan perempuan dalam partai politik ini dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor penghambat dan faktor pendorong. Faktor Penghambat meliputi kurangnya minat perempuan terhadap politik, Adanya stereotip (anggapan) negative tentang politik, serta kurangnya dukungan dari Partai Politik. Sedangkan faktor pendorongnya yaitu adanya kesadaran perempuan tentang politik karena adanya pendidikan politik secara formal dan informal, ajakan dari kader-kader di dalam partai, dan karena adanya latar belakang individu pendidikan dan loyalitas.

Demi perbaikan langkah kedepan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam partai politik, seharusnya kader perempuan harus lebih berani mengaktualisasikan diri mereka secara total dalam ranah politik. Penekanan angka kuota perempuan semestinya dicantumkan di AD ART partai politik agar dapat menjadikan pedoman partai dalam menjalankan visi misi. Serta partai politik dapat memberikan kepercayaan kepada perempuan untuk menempatkan jabatan di struktural partai yang tidak hanya diisi oleh kaum laki-laki.